

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI V DPR RI

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/BASARNAS)

Tahun Sidang

: 2021 – 2022

Masa Sidang

: 111

Rapat

: Ke – 17

Jenis Rapat

: Rapat Dengar Pendapat

Hari/Tanggal

: Senin, 7 Februari 2022

Sifat

: Terbuka

Pukul

: 13.10 WIB s.d 15.35 WIB

Tempat

: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI

dan secara Virtual Zoom Cloud Meeting dari tempat masing-masing

Acara

: Membahas Progres Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ketua Rapat

: H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si

Sekretaris

: Nanik Sulistyawati, S.A.P

Hadir Anggota

: Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan

Virtual

Hadir Mitra

: Dirjen Perkeretaapian dan Dirut PT. Kereta Cepat Indonesia Cina

(KCIC) beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

- 1. Rapat dibuka pada pukul 13.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perkeretaapian pada hari ini adalah membahas Progres Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
- 3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Perkeretaapian dan Dirut PT. KCIC untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
- 4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

- 1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Perkeretapian dan Direktur PT. KCIC terkait dengan progres Kereta Cepat Jakarta Bandung. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian dan PT. KCIC untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung.
- 2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KCIC untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis serta dampak pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.
- 3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KCIC untuk memperjelas status kepemilikan dari struktur permodalan pasca perubahan postur anggaran dalam penyelenggaraan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
- Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KCIC untuk selalu memprioritaskan keselamatan kerja dan ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung.
- 5. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KCIC untuk melibatkan lebih banyak porsi kepada penyedia jasa lokal dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung.
- 6. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KCIC untuk segera menyelesaikan review terhadap dokumen perencanaan (feasibility study) sebagai bahan untuk menjalankan fungsi pengawasan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB.

Jakarta, 7 Februari 2022

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ZULFIKRI

PIMPINAN RAPAT,

ANDI IWAN DARMAWAN ARAS